



## **Pengaruh Perkembangan Kota Singapura terhadap Angka Pengungkapan Penyelundupan Barang Palsu di Pelabuhan PSA Singapura**

Mahadika Ariobowo

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:  
<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

This research is aiming to know the impact of the implementation of ACFTA, such as the raising of trade activity in PSA Singapore and the raising of illicit counterfeit goods in PSA Singapore, as well as to know the cause of its problems. In this research, Statistic Criminal Theory used to determine the relation between Illicit Counterfeit Goods with City Development of Singapore. The method of this research is explanative by appointing one problem and focusing on the cause of the problem. The outcome of the research is that there is a relation between the illicit counterfeit goods with trade agreement and the city development of Singapore with the use of City Development Index from UN-HABITAT 1998 as a measurement. This research also found that the more developed and advanced a city, the more vulnerable a city would be towards criminality.

**Keywords:** *Singapore, ASEAN, ACFTA, trade, port, PSA Singapore, Illicit, counterfeit goods, statistic criminal, city development, CDI*

### **Pendahuluan**

Permasalahan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura bukanlah suatu hal yang baru bagi Singapura. Hal tersebut dikarenakan peran Singapura sebagai negara yang mempunyai pelabuhan, yang berfungsi sebagai hub untuk perdagangan Internasional. Pada tahun 2000 hingga 2005, tercatat setidaknya terjadi kurang dari 50 kasus pengungkapan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura setiap tahunnya (UNODC, 2013). Permasalahan penyelundupan barang palsu ini merupakan salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari dilakukannya perdagangan Internasional. Sehingga, untuk mengamankan dan memperlancar aktivitas perdagangan internasional, diperlukan adanya regulasi dan pelayanan pengamanan yang baik. Pemerintah Singapura melalui Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) dan Singapore Custom selalu melakukan perbaikan sistem pelayanan dan keamanan untuk menghadapi masalah tersebut (PSA Singapore, 2017). Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan dibentuknya sebuah perjanjian perdagangan, baik bilateral maupun multilateral, yang dapat mengatur perdagangan internasional.

ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) adalah salah satu perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Singapura, dibawah organisasi regional ASEAN. Salah satu latar belakang dari dibentuknya perjanjian ini adalah adanya keyakinan dari ASEAN yang melihat bahwa terdapat peluang dari perekonomian Cina yang semakin maju, serta didukung dengan fakta bahwa Cina merupakan tujuan pasar terbesar karena jumlah penduduknya yang banyak (ASEAN, 2012). Tujuan dari dibentuknya ACFTA ini sendiri adalah adanya upaya untuk meningkatkan perekonomian, perdagangan, dan investasi antar anggotanya (ASEAN, 2012). Selain itu, terdapat beberapa fokus kerjasama yang dilakukan dibawah ACFTA, salah satunya adalah *mendukung Intellectual Property Right (IPR)* dengan cara memerangi penyebaran barang

palsu (ASEAN, 2012). Pembentukan ACFTA sendiri mulai diinisiasi pada tahun 2001, ditandatangani pada tahun 2004, diimplementasikan mulai tahun 2005, dan diberlakukan secara efektif pada tahun 2010 dengan mewajibkan seluruh anggotanya, yaitu ASEAN dan Cina untuk mengeliminasi tariff sampai dengan 90% (ASEAN, 2012). Salah satu yang terkena dampak dari adanya perjanjian ini adalah Singapura.

Singapura merupakan negara kecil yang terdiri dari satu kota saja dan terletak di ujung semenanjung Malaysia dengan penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa (Central Intelligence Agency, 2015). Negara ini menjadi kontras jika dibandingkan dengan negara lainnya yang berada di regional yang sama karena kekuatan ekonomi yang sangat berbeda. Hal ini didukung dengan letak geografis Singapura yang strategis, yang dilalui jalur utama perdagangan laut dunia. Sehingga menjadikan pelabuhan PSA Singapura sebagai jantung penggerak ekonomi utama negara tersebut. Dengan adanya ACFTA, hal ini memberikan dampak berupa meningkatnya aktivitas perdagangan di Pelabuhan PSA Singapura. Pada tahun 2010, angka bongkar muat kontainer di PSA Singapura tercatat sebanyak 27,7 juta TEU, meningkat sebanyak 10,4 % dari tahun sebelumnya, dan terus meningkat setiap tahunnya (PSA Singapore, 2016).

Peningkatan aktivitas perdagangan di PSA Singapura ternyata juga diikuti oleh adanya kenaikan nilai impor yang dilakukan Singapura, baik dengan Cina maupun secara keseluruhan. Nilai impor secara keseluruhan yang dilakukan oleh Singapura pada tahun 2010 telah mencapai 423,2 juta dolar Amerika dengan nilai impor dengan Cina yang mencapai 45,8 juta dolar Amerika, meningkat sebesar 21,9% dari tahun sebelumnya (International Enterprise Singapore, 2015). Namun, kenaikan volume perdagangan pasca diberlakukannya ACFTA pada tahun 2010 telah memberi dampak lain, yaitu berupa adanya kenaikan angka pengungkapan penyelundupan barang palsu yang terjadi di Pelabuhan PSA Singapura. Sebagai negara maju, dengan permasalahan penyelundupan barang palsu yang mengalami kenaikan setelah diberlakukannya ACFTA, telah menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya angka pengungkapan penyelundupan barang palsu yang masuk melalui Pelabuhan PSA Singapura.

Untuk menganalisis masalah tersebut, peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang berangkat dari teori Statistik Kriminal yang dapat digunakan sebagai metode dalam meneliti aktivitas kejahatan dalam menemukan keterkaitan, keteraturan, kecenderungan, dan hukum sosial (Effendi, 2017). Statistik Kriminal sendiri muncul dan diprakarsai oleh seorang ahli statistik dan kriminologi Belgia yang bernama Adolph Quetelet. Menurutnya, kejahatan bukan merupakan gejala perbuatan perseorangan, melainkan sebagai fenomena yang bersifat masal. Quetelet kemudian menyimpulkan bahwa kejahatan dapat diberantas dengan cara memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kejahatan secara hukum dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku dan dapat dijatuhi hukuman oleh penegak hukum yang bertanggung jawab (Bohm & Haley, 2002). Secara teoritis, penyelundupan barang palsu merupakan sebuah kejahatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, adanya data mengenai angka penyelundupan barang palsu merupakan sebuah statistik kriminal yang dapat dipakai dalam melakukan sebuah penelitian.

Sedangkan kualitas masyarakat pada teori statistik kriminal, dapat diartikan sebagai sebuah Perkembangan Kota karena sejalan dengan konsep development yang dikeluarkan oleh UNDP pada tahun 1998. Perkembangan Kota adalah suatu perubahan sebagian atau menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan kota baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik (Hendarto, 1997). Sedangkan konsep perkembangan kota atau *city development* yang dikeluarkan oleh UNDP dikenal sebagai *City Development Index* (CDI) dimana konsep tersebut berhubungan dengan perkembangan kota dan wilayah urban yang dapat diukur. Hal-hal tersebut dapat berupa tingkat perkembangan, kondisi layak huni, , kerugian yang relative atau kemiskinan, dan kemacetan atau inklusivitas (UN-Habitat, 2002).

Konsep *development* atau perkembangan sendiri mempunyai arti sebagai serangkaian proses peningkatan kapasitas dibidang ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan standar hidup warga negaranya. Namun sejak awal 1990-an, konsep ini telah bergeser menjadi sebuah upaya menciptakan kesejahteraan melalui pembentukan masyarakat yang berkesinambungan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang cenderung lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat (Ashari, 2015). Sehingga dalam

penelitian ini, kualitas kehidupan masyarakat yang dimaksud dalam Teori Statistik Kriminal yang diajukan oleh Quetelet berupa tingkat perkembangan kota Singapura yang diukur melalui CDI.

CDI yang diajukan oleh UNDP pada tahun 1997 secara tidak langsung sejalan dengan konsep perkembangan yang merupakan suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan warga suatu negara yang dapat diukur dalam beberapa indikator. Dalam CDI, indikator tersebut dibagi ke dalam lima sub-indikator utama, yaitu *produk kota*, Manajemen Pengolahan Limbah, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Kelima indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah kota telah berkembang dan menjadi tolak ukur mengenai fokus pengembangan kota untuk tahun-tahun selanjutnya (UN-Habitat, 2001).

Dengan adanya penelitian ini, statistik kriminal dan CDI mempunyai hubungan dasar yang membuat penelitian ini dapat dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sub-indikator pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan manajemen limbah. Sub-indikator tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sub-indikator produk kota merupakan hasil dari adanya usaha penguatan ekonomi kota tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, ACFTA atau perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh Singapura, dapat mempengaruhi tingkat perkembangan kota Singapura itu sendiri.

Indikator-indikator dalam CDI yang telah dipaparkan di atas saling berkesinambungan satu sama lain dan berperan penting dalam perkembangan kota Singapura. Perkembangan yang dilakukan tersebut merupakan upaya dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan usaha dan interaksi yang dilakukan, baik pemerintah maupun swasta, terhadap perekonomian, keuangan, komunikasi, kebudayaan, dll (Albrow & King, 1990). Integrasi tersebut mengizinkan dan memudahkan untuk melakukan mobilisasi melewati batas-batas negara dan perpindahan manusia, modal, data, barang, dan jasa (Albrow & King, 1990). Hal-hal tersebut termasuk didalamnya berupa pengurangan atau penghilangan kewajiban visa bagi pengunjung, tariff atau non-tariff dalam perdagangan internasional, kemudahan regulasi investasi, serta peningkatan konektivitas melalui transportasi dan infrastruktur digital yang lebih baik. Globalisasi diperlukan untuk memastikan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan untuk menghilangkan ancaman dan tantangan global yang semakin berkembang, seperti polusi udara dan polusi laut. Globalisasi telah menciptakan kemakmuran dan perkembangan ekonomi yang tinggi, tetapi juga telah membuat perbedaan pendapatan negara yang signifikan (Albrow & King, 1990).

Sedangkan internasionalisasi dapat diartikan sebagai usaha, baik pemerintah maupun swasta, dalam membuka kesempatan untuk mendapatkan efisiensi secara global, mengelola risiko dengan memanfaatkan fleksibilitas multinasional dan diversifikasi portfolio, percepatan inovasi dan pembelajaran, mengikuti customer global serta membangun reputasi (Grant, 2007). Hal ini didukung dengan adanya kesepakatan untuk membuka batasan perdagangan, penghapusan hambatan sehingga mendorong perdagangan global sebagai peluang dan tantangan.

## **Pembahasan**

Singapura sebagai salah satu negara kota atau *citystate* yang ada di dunia dengan luas kurang dari 700 km<sup>2</sup> (Central Intelligence Agency, 2015), hanya mengandalkan perdagangan internasional sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (Koh, 2015). Hal ini dikarenakan ketiadaan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah Singapura. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan Singapura, sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Setidaknya, terdapat 11 perjanjian perdagangan bilateral yang dilakukan oleh Singapura. Perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan dengan beberapa negara yaitu Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Panama, Peru, Australia, Costa Rica, Jordan, dan Amerika Serikat 89 (International Enterprise Singapore, 2015). Selain itu, Singapura juga diketahui melakukan perjanjian ekonomi/perdagangan regional yang dilakukan dibawah ASEAN maupun perjanjian dengan regional lainnya. Terdapat sedikitnya 9 perjanjian ekonomi regional yang dilakukan oleh Singapura. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain ASEAN-Australia-Selandia Baru, ASEAN-Cina, ASEAN-India, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea Selatan, ASEAN FTA, EFTA-Singapura, GCC-Singapura, dan Trans Pacific Strategic Economic Partnership (International Enterprise Singapore, 2015). Selain itu, terdapat tiga perjanjian lainnya, baik bilateral maupun multilateral,

yang telah dilakukan penandatanganan, namun belum dapat digunakan. Ketiga perjanjian tersebut adalah *European Union – Singapore FTA*, *Trans – Pacific Partnership*, dan *Turkey – Singapore FTA* (International Enterprise Singapore, 2015).

Dari berbagai kerja sama yang dimiliki oleh Singapura, ACFTA merupakan salah satu perjanjian perdagangan yang sangat berperan penting dalam aktivitas perdagangan Singapura (International Enterprise Singapore, 2015). Hal ini terbukti dari nilai perdagangan Singapura dan Cina yang mencapai 123,45 miliar dolar Singapura pada tahun 2015, yang merupakan nilai perdagangan terbesar yang dilakukan oleh Singapura dibandingkan dengan kerja sama yang dilakukan dengan negara lain. Selain itu, penetrasi dari diberlakukannya ACFTA adalah secara berkala sejak tahun 2005, berbeda dengan perjanjian bilateral Cina-Singapura yang baru dilakukan sejak tahun 2009. Untuk itu, ACFTA dipilih sebagai indikator kenaikan penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura melalui Pelabuhan PSA Singapura.

ACFTA adalah Kawasan Perdagangan Bebas, yang dilakukan antara sepuluh anggota ASEAN dengan Cina, dalam rangka untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kawasan. Cina mulai menginisiasi kerjasama ini pada tahun 2001, dengan tujuan untuk menjadikan Cina sebagai rekan perdagangan utama untuk negara-negara ASEAN selain Uni Eropa, Amerika, dan Jepang (ASEAN China Free Trade Agreement Business Portal, 2016). ACFTA sendiri tidak hanya berfokus pada pemotongan tarif saja, melainkan dilakukannya kerjasama-kerjasama lainnya, seperti memfokuskan ruang lingkup kepada meminimalisir halangan untuk mempermudah laju perpindahan barang, serta mendorong dilakukannya investasi dan memperkuat kerjasama antar anggota. Negara-Negara ASEAN dan Cina sebagai negara anggota perjanjian tersebut setuju untuk mengeksplor dan melakukan aktivitas kerjasama ekonomi pada area-area tertentu, seperti isu yang berkaitan dengan perdagangan; pertanian, perikanan, kehutanan, dan produk kehutanan; teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan sumber daya manusia; investasi; perdagangan jasa; pariwisata; kerjasama perusahaan antar negara; Intellectual Property Right; bisnis kecil dan menengah; lingkungan; serta lingkup lain yang berkaitan dengan perdagangan yang disetujui oleh kedua belah pihak (ASEAN, 2012).

ACFTA juga dianggap sebagai perjanjian perdagangan bebas terbesar didunia karena melingkupi jumlah pasar konsumen lebih dari 1,7 miliar orang, dengan GDP total mencapai 2 triliun dolar Amerika, dan estimasi perdagangan mencapai 1,23 miliar dolar Amerika (ASEAN, 2012). Dengan estimasi perdagangan tersebut, terbukti telah terjadi kenaikan dari tahun diberlakukannya ACFTA. Total nilai perdagangan ASEAN dengan Cina tersebut mencapai 236.218,6 juta dolar, naik sebesar 32,5% pada tahun 2010. Hal tersebut diukti dengan nilai perdagangan Singapura dengan Cina dari tahun 2009 yang mengalami kenaikan hingga tahun 2014. Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2010, dengan presentasi sebesar 52,3%, menjadi 79,568.4 juta dolar. Total nilai perdagangan yang dilakukan oleh Singapura dengan Cina di bawah ACFTA terus mengalami peningkatan sejak diberlakukannya secara efektif pada tahun 2010.

Adanya perjanjian ekonomi yang dilakukan oleh Singapura dengan negara lain secara langsung meningkatkan aktivitas perdagangan di pelabuhan PSA Singapura. Hal ini dikarenakan sifat Singapura sendiri sebagai negara kecil yang memusatkan aktivitas perdagangan internasional pada pelabuhan PSA Singapura. PSA Singapura adalah pelabuhan utama yang dimiliki oleh Singapura dengan memfokuskan aktivitas perdagangannya di sana. Semenjak dibentuk pertama kali pada tahun 1964, pelabuhan tersebut terus mengalami peningkatan fasilitas demi terciptanya aktivitas perdagangan yang aman dan memadai (PSA Singapore, 2016). PSA Singapura beroperasi di bawah The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) sebagai badan negara yang mewakili Pemerintah Singapura dalam urusan kemaritiman.

Jumlah kargo yang masuk terus mengalami kenaikan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Sebanyak 472.300.000 tonnase tercatat memasuki Pelabuhan PSA Singapura dengan pembagian kargo berjenis umum sebanyak 280.349.000 tonnase dan kargo berjenis bulk sebanyak 191.951.000 tonnase. Kenaikan terus terjadi hingga tahun 2014 dengan jumlah kargo sebanyak 581.269.000 tonnase dengan pembagian sebanyak 384.418.000 tonnase untuk kargo jenis umum dan 196.850.000 tonnase untuk kargo jenis bulk (Statistic Singapore, 2016). Adanya peningkatan aktivitas bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan PSA Singapura telah diikuti dengan adanya total nilai perdagangan yang dilakukan di Pelabuhan PSA Singapura.

Selain itu, nilai perdagangan yang dilakukan di PSA Singapura pada tahun 2009 sebanyak 747.417,4 Juta dolar. Kenaikan terjadi pada tahun 2010 dengan eskalasi sebesar 20,6% dengan nilai perdagangan mencapai 902.062,6 Juta dolar. Nilai perdagangan tersebut terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2013 menjadi 975.945,6 Juta dolar. Adanya keikutsertaan Singapura dalam perjanjian multilateral ACFTA yang dilakukan dengan Cina dibawah ASEAN merupakan salah satu penyebab terjadi kenaikan aktivitas perdagangan di pelabuhan tersebut. Namun, adanya kenaikan aktivitas tersebut tidak terlepas dari ancaman-ancaman ekonomi yang dapat terjadi melalui pelabuhan PSA Singapura.

PSA Singapura tidak hanya berfokus kepada peningkatan keefektifitasan operasional saja, melainkan juga berupaya untuk menyeimbangkan antara hal tersebut dengan fasilitas keamanan yang dimiliki. Dalam website resmi PSA Singapura, tertulis bahwa terdapat lima aspek utama dalam upayanya untuk meningkatkan fasilitas keamanan PSA Singapura. Aspek-aspek tersebut yaitu adanya penggunaan teknologi secara maksimal, kerjasama dengan pemerintahan atau pihak berwenang baik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbasis kerangka kerja 3 tingkat regulasi, integrasi dengan sistem operasional, perubahan pola pikir, kolaborasi dengan industri. Dengan adanya kelima aspek utama tersebut, PSA Singapura mempunyai sistem dan fasilitas keamanan pelabuhan yang memadai. Namun, hal tersebut tidak membuat pelabuhan PSA Singapura terbebas dari ancaman-ancaman yang dapat masuk, termasuk salah satunya adalah penyelundupan barang palsu.

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh UNODC pada tahun 2013 mengenai persebaran barang palsu di Asia Pasifik, setidaknya terdapat lima alasan mengenai berbahaya barang palsu, yaitu benda atau barang yang berbahaya yang dijual seperti barang-barang dengan kualitas yang buruk yang dapat mengganggu kesehatan; biasanya dapat terhubung dengan Transnasional Organize Crimed seperti prostitusi, pencucian uang, dan perdagangan manusia; dapat menjadi fasilitas untuk ajang korupsi dengan cara melemahkan kualitas dan kekuatan hukum; eksploitasi kondisi pekerja biasanya dengan cara dengan tidak adanya regulasi yang jelas yang melindungi hak-hak pekerja; adanya kerugian negara secara ekonomi seperti kehilangan pembayaran bea import, kehilangan pajak penjualan, serta penurunan pemasukan secara keseluruhan (UNODC, 2013).

Penyelundupan barang palsu dapat menjadi salah satu masalah yang terjadi pada sebuah negara yang menjalankan perdagangan internasional, tidak terkecuali Singapura. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelundupan adalah sebuah proses atau cara untuk membawa masuk barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena memasukan barang terlarang. Sedangkan barang palsu merupakan barang yang diproduksi dengan model tertentu dengan kualitas yang rendah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai ACFTA di atas, salah satu tujuan ACFTA sendiri adalah memerangi penyebaran barang palsu dalam rangka mendukung *Intellectual Property Right*. Namun dengan disajikannya data mengenai peningkatan aktivitas di pelabuhan PSA Singapura dan nilai perdagangan Singapura setelah diberlakukannya ACFTA di atas, didapati bahwa perjanjian tersebut telah memberikan dampak lain berupa adanya peningkatan angka penyelundupan barang palsu di PSA Singapura.

Dari data yang dihimpun melalui situs World Custom Organization (WCOOMD), diketahui bahwa telah terjadi kenaikan jumlah kasus penyelundupan barang palsu yang masuk ke Singapura. Pada tahun 2009, tercatat sebanyak 70 jumlah kasus penyelundupan barang palsu di Singapura. Namun setelah tahun 2010, data menunjukkan bahwa terus terjadi kenaikan hingga kembali turun pada tahun 2014. Sebanyak 122 Jumlah kasus terjadi pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing terjadi sebanyak 181 jumlah kasus dan 211 jumlah kasus. Kenaikan sebanyak 141,7 % terjadi pada tahun 2013, yaitu tercatat sebanyak 510 jumlah kasus.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat lima aspek utama yang dilakukan oleh PSA Singapura sebagai cara untuk meningkatkan kualitas keamanan pelabuhan PSA Singapura karena sifatnya yang rentan dengan berbagai ancaman. Dengan adanya perjanjian ekonomi antara Singapura dengan negara lain, hal tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas pelabuhan PSA Singapura, tetapi juga mempengaruhi tingkat keamanan yang dimiliki oleh PSA Singapura. Tingkat keamanan diukur dengan menggunakan angka penyelundupan

barang palsu yang disebut juga sebagai Statistik Kriminal. Dalam Statistik Kriminal yang diajukan oleh Quetelet disebutkan bahwa kenaikan dalam angka kejahatan disebabkan oleh adanya penurunan kualitas dari perkembangan kota tersebut (Effendi, 2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya pengukuran perkembangan kota untuk membuktikan teori yang dikemukakan oleh Quetelet di atas.

Salah satu indikator yang dapat dipakai dalam mengukur perkembangan kota secara spesifik salah satunya adalah CDI yang dikeluarkan oleh UN-HABITAT. Keadaan kota-kota di dunia yang terus mengalami pertumbuhan baik dari segi ukuran maupun demografis menjadi latar belakang UN-HABITAT dalam membuat CDI menjadi suatu indikator yang dilakukan oleh suatu kota untuk melihat kinerja kota tersebut dalam menghadapi pertumbuhan (UN-HABITAT, 2002). Terdapat lima sub-indikator yang dipakai untuk mengukur sejauh mana kota itu mengalami perkembangan. Sub-indikator tersebut ialah infrastruktur yang baik, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tepat, manajemen limbah, dan produk ekonomi suatu kota (UN-HABITAT, 2002).

Pada sub-indikator Infrastruktur dan Manajemen Limbah telah mendapatkan poin 100 sejak tahun 2009. Hal itu dikarenakan infrastruktur dan manajemen limbah yang dimiliki oleh Singapura telah menjadi perhatian khusus Singapura sejak lama. Sehingga, pada tahun 1998, angka sub-indikator Infrastruktur dan Manajemen Limbah Singapura ketika dilakukan pengukuran CDI oleh UN-Habitat telah mencapai angka 100 dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara (UN-HABITAT, 2002). Pada sub-indikator lain seperti Kesehatan, Pendidikan, dan Produk kota Kota Singapura telah mengalami perubahan yang fluktuatif dengan rata-rata mengalami kenaikan. Oleh karena itu, nilai perolehan CDI Kota Singapura yang mendapatkan 96,56 poin pada tahun 2009, mengalami kenaikan hampir sama dengan 1 poin pada tahun 2014, menjadi 97,41 poin.

Perubahan Kota Singapura yang telah diukur dengan menggunakan CDI terbukti telah mengalami perkembangan, dimana angka perolehan nilai CDI Kota Singapura mengalami peningkatan. Dari hal tersebut, dapat ditarik asumsi bahwa adanya peningkatan perkembangan kota Singapura tidak membuat angka kejahatan yang ada di pelabuhan mengalami penurunan.

Terdapat lima sub-indikator yang dipakai dalam mengukur CDI. Kelima sub-indikator tersebut adalah Produk Kota, Kesehatan, Pendidikan, Manajemen Limbah, dan Produk Kota. Masing-masing sub-indikator tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat keamanan pelabuhan PSA Singapura. Infrastruktur menjadi salah satu sub-indikator yang penting dalam melihat perkembangan suatu kota (UN-HABITAT, 2002). Dalam penghitungan CDI yang dilakukan oleh UN-HABITAT pada tahun 1998, Infrastruktur Singapura sudah mencapai poin 100. PSA Singapura sebagai pelabuhan utama Singapura selalu memperbaiki dan memperbaharui infrastruktur yang tersedia untuk menunjang kelancaran aktivitas yang dilakukan di PSA Singapura, salah satunya adalah dengan melakukan ekspansi wilayah dan menambah jumlah terminal sehingga dapat menampung lebih banyak kapal yang datang (PSA Singapore, 2017). Pada tahun 1994, angka bongkar muat yang dilakukan di PSA Singapura sudah mencapai 10 Juta TEU yang terus meningkat dan menjadikan PSA Singapura sebagai pelabuhan pertama di dunia yang telah menerima muatan container sebesar 500 Juta TEU secara kumulatif pada tahun 2014 (PSA Singapore, 2017).

Sub-indikator selanjutnya adalah sub-indikator kesehatan. Pada dasarnya, semakin baik kualitas kesehatan suatu kota, maka semakin baik pula keadaan kesehatan penduduknya (UN-HABITAT, 2002). PSA Singapura telah berkomitmen kuat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman untuk para pekerjanya. Beberapa keuntungan dan fasilitas yang diberikan oleh PSA Singapura, dalam hal ini fasilitas kesehatan, antara lain: mendapatkan subsidi tahunan untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut; adanya acara kebugaran yang diselenggarakan secara rutin untuk menjaga dan memelihara kesehatan dan kebugaran para pekerja; tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan sehari-hari seperti bungalow atau ruang bersantai untuk menjaga agar pikiran tetap fokus dan menunjukkan performa kerja yang baik; serta tersedianya fasilitas asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi terkemuka di Singapura (PSA Singapore, 2017).

Pada sub-indikator Pendidikan, PSA Singapura sebagai satu pelabuhan yang bertanggung jawab dalam mengatur jalur perdagangan, baik masuk ataupun keluar Singapura, mempunyai

beberapa tuntutan dan standar yang dipakai dalam meningkatkan kualitasnya. Salah satunya adalah diperlukannya pendidikan yang memadai dan sesuai dengan bidang yang diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya spesialisasi pembagian kerja agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu, sesuai dengan salah satu aspek yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas keamanan, PSA Singapura secara berkala melakukan komunikasi dengan para pekerja dan mengadakan pendidikan, pelatihan, seminar, serta studi banding dalam mempelajari tren ancaman yang dapat datang (PSA Singapore, 2017). Beasiswa Sarjana diberikan kepada para pemuda yang berada di bidang Operasional, Teknologi Informasi, dan Teknik yang nantinya akan dapat bekerja di lingkup PSA Singapura jika menunjukkan performa yang baik selama menempuh pendidikan (PSA Singapore, 2017).

Sub-indikator manajemen limbah yang dimiliki oleh Singapura juga telah mendapatkan poin 100 sejak dilakukannya penghitungan CDI oleh UN-HABITAT pada tahun 1998, sejalan dengan sub-indikator Infrastruktur. Hal ini juga berpengaruh pada manajemen limbah yang dimiliki di dalam PSA Singapura. Manajemen tersebut sejalan dengan adanya upaya untuk selalu memperbaharui infrastruktur yang ada. Selain itu, adanya manajemen limbah yang baik di dalam pelabuhan PSA Singapura, dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dan memaksimalkan kinerja para pekerja.

Sub-indikator selanjutnya adalah Produk kota yang menjadi sub-indikator akhir sekaligus awal. Produk kota dapat menjadi sub-indikator akhir karena merupakan hasil dari keseluruhan sub-indikator. Produk kota dapat menggunakan GDP sebagai komponen dalam menghitungnya. Semakin besar GDP yang dihasilkan oleh suatu wilayah, maka semakin besar pula kemungkinan wilayah tersebut untuk dapat mengeluarkan dana yang akan dipakai dalam pembangunan. Selain itu, dikarenakan pemusatan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Singapura di PSA Singapura, kenaikan GDP secara tidak langsung dipengaruhi oleh adanya peningkatan aktivitas perdagangan yang dilakukan di Pelabuhan PSA Singapura itu sendiri. Adanya kapal-kapal muatan yang berlabuh dan berlakunya tarif berlabuh kapal-kapal tersebut akan membantu PSA Singapura dalam meningkatkan pendapatan dan melakukan peningkatan kualitas pelayan dan keamanan pelabuhan itu sendiri.

Dari penghitungan yang dilakukan pada tahun 2009 hingga tahun 2014, terjadi kenaikan angka CDI. Jika ternyata terjadi kenaikan pada angka CDI dalam mengukur perkembangan kota Singapura, maka seharusnya angka penyelundupan barang palsu yang masuk melalui PSA Singapura terjadi penurunan. Salah satu alasan adanya ketidaksesuaian dengan teori yang dikemukakan Quetelet disebabkan adanya *darkfigure* atau *dark number* dalam Statistik Kriminal. Dalam mengukur tingkat kemananan pelabuhan yang diukur dari adanya angka pengungkapan penyelundupan barang palsu, tidak menunjukkan adanya angka penyelundupan barang palsu yang sesungguhnya. Karena angka yang tersaji hanya merupakan angka penyelundupan yang dapat terungkap oleh penegak hukum. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dari Statistik Kriminal itu sendiri.

Dari pemaparan di atas, adanya peningkatan perkembangan Kota Singapura mempengaruhi adanya peningkatan kualitas dari PSA Singapura yang berpengaruh dengan adanya kenaikan angka pengungkapan penyelundupan barang palsu yang masuk melalui pelabuhan PSA Singapura.

## **Kesimpulan**

Singapura sebagai salah satu negara anggota ACFTA secara tidak langsung terkena dampak dari adanya perjanjian tersebut. Sejak tahun 2010, telah terjadi peningkatan aktivitas perdagangan yang dilakukan di Pelabuhan PSA Singapura. Peningkatan tersebut juga diikuti oleh naiknya nilai perdagangan yang dilakuka oleh Singapura. Namun, hal tersebut rupanya diikuti pula oleh naiknya angka pengungkapan penyelundupan barang palsu yang masuk di Pelabuhan PSA Singapura.

Setelah dilakukan pengitungan dengan menggunakan City Development Index yang digunakan untuk mengukur perkembangan kota Singapura, didapati bahwa Kota Singapura memang mengalami kenaikan kualitas kota pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Hal ini berarti bahwa kualitas masyarakat yang digambarkan melalui tiap-tiap sub-indikator dalam CDI juga mengalami peningkatan. Sehingga yang terjadi adalah adanya SDM yang semakin baik dan

berkualitas, terutama di Pelabuhan PSA Singapura. Dengan semakin baiknya kualitas SDM yang terbatas tersebut, ditambah dengan baiknya infrastruktur dan penggunaan teknologi secara maksimal di Pelabuhan PSA Singapura, membuat angka pengungkapan penyelundupan barang palsu semakin tinggi, terlepas dari *dark numbers* yang sifatnya tidak diketahui secara pasti. Sehingga dengan kata lain, hal tersebut merupakan hal yang baik karena penyelundupan barang palsu dapat semakin di ungkap.

## Referensi

- Albrow, M., & King, E. (1990). *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage.
- ASEAN China Free Trade Agreement Business Portal. (2016, May 03). *About Us*. Retrieved from ASEAN China Free Trade Area Business Portal: <http://www.asean-cn.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=267&id=84>
- ASEAN. (2012, October 12). *ASEAN - China Free Trade Agreement*. Retrieved Agustus 14, 2017, from ASEAN: [http://asean.org/?static\\_post=asean-china-free-trade-area-2](http://asean.org/?static_post=asean-china-free-trade-area-2)
- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Bohm, R. M., & Haley, K. N. (2002). *Introduction to Criminial Justice: Third Edition*. California: Glencoe McGraw-Hill.
- Central Intelligence Agency. (2015). *Central Intelligence Agency The World Facts Book*. Retrieved from Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html>
- Effendi, T. (2017). *Dasar-dasar Kriminologi*. Malang: Setara Press.
- Grant. (2007). *Contemporary Strategy Analysis*. Blackwell.
- Hendarto, R. M. (1997). *Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota*. Semarang.
- International Enterprise Singapore. (2015). *Singapore Free Trade Agreement*. Retrieved from International Enterprise Singapore: <https://www.iesingapore.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements/free-trade-agreements/Singapore-FTA>
- Koh, T. (2015, March 25). *Remembering Lee Kuan Yew: Our chief diplomat to the world*. Retrieved from Straits Times: <http://www.straitstimes.com/singapore/remembering-lee-kuan-yew-our-chief-diplomat-to-the-world>
- PSA Singapore. (2017). *About Us: Milestones*. Retrieved from PSA Singapore: <https://www.singaporepsa.com/about-us/history>
- PSA Singapore. (2017). *Careers: Benefits*. Retrieved from PSA Singapore: <https://www.singaporepsa.com/careers/benefits>
- PSA Singapore. (2017). *Our Commitment: Security*. Retrieved from PSA Singapore: <https://www.singaporepsa.com/our-commitment/security-oc>
- PSA Singapore. (2017). *Careers: Scholarship*. Retrieved from PSA Singapore: <https://www.singaporepsa.com/careers/young-aspirations>
- PSA Singapore. (2016). *About Us*. Retrieved from PSA Singapore: <https://www.singaporepsa.com/about-us>
- Statistic Singapore. (2016). *Yearbook Statistic of Singapore 2016*. Singapore: Statistic Singapore.
- UN-Habitat. (2002). *Global Urban Indicators Database*. Retrieved January 5, 2016, from UN-Habitat: <http://unhabitat.org/books/global-urban-indicators-database/>
- UN-HABITAT. (2002). *Global Urban Indicator Database Version 2*. Nairobi: UN-HABITAT Publications.
- UN-Habitat. (2001). *The State of the World's Cities*. Montreal: Production MR.
- UNODC. (2013). *Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific. A Threat Assesment*, UNODC.
- WCCOMD. (2015). *WCOOMD Container Control Program Annual Report*. Brussels: WCOOMD.